

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perekonomian pada Kabupaten Gresik relatif lebih tinggi dibandingkan dengan regional di Provinsi Jawa Timur. Pembangunan daerah merupakan serangkaian proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah. Dalam rangka menjaga konsistensi pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Tahap perencanaan pembangunan daerah sendiri dibagi secara jangka panjang, jangka menengah, serta rencana kerja pemerintah daerah. Untuk menindaklanjuti rencana pembangunan daerah pemerintah daerah, disusunlah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) oleh pemerintah daerah guna memberikan gambaran akan pembangunan daerah. Tuntutan transparansi mendorong adanya pengukuran atau penilaian kinerja di instansi pemerintah daerah, hal ini menjadi sorotan publik karena semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik (Pemerintah Kabupaten Gresik, 2021).

Salah satu evaluasi atau penilaian atas kinerja pemerintah dapat dilihat dari laporan keuangan pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab dalam membagikan laporan keuangan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban pemerintah kepada public yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Salah satu alat untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan

pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, memperhitungkan keadaan serta hasil operasional, memastikan tingkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terpaut dengan permasalahan keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efektivitas. Pengukuran kinerja untuk kepentingan public bisa dijadikan evaluasi atau penilaian dan pemulihan kinerja dengan membandingkan skema kerja penerapannya. Tidak hanya itu pula bisa digunakan sebagai tolok ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Berikut disajikan dalam tabel data Laporan Ralisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik tahun 2017-2021.

**Tabel 1.1 Data LRA Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Belanja Daerah</b>
2017	2.742.201.536.264,20	2.116.216.445.466,02
2018	2.876.343.695.519,71	2.118.545.900.336,73
2019	3.119.200.157.022,91	2.399.289.318.844,41
2020	2.939.477.566.194,07	2.485.716.405.435,02
2021	3.133.574.194.041,41	3.192.751.639.289,33

Sumber : Kabupaten Gresik

Dalam tabel tersebut, diketahui bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.742.201.536.264,20 mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar Rp 2.876.343.695.519,71. Sedangkan Belanja Daerah Kabupaten Gresik tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.116.216.445.466,02 mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar Rp 2.118.545.900.336,73. Lalu di tahun 2019 pendapatan daerah kabupaten gresik mengalami kenaikan sebesar Rp 3.119.200.157.022,91 dan Belanja Daerah meningkat sebesar Rp 3.119.200.157.022,91. Untuk ditahun 2020 Pendapatan daerah mengalami

penurunan sebesar Rp 2.939.477.566.194,07 tetapi untuk belanja daerah kenaikan sebesar Rp 2.485.716.405.435,02 dan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 3.133.574.194.041,41 ditahun 2021 dan Belanja Daerah pun mengapami peningkatan sebesar Rp 3.192.751.639.289,33.

Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan memang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah di masa yang akan datang. Salah satu solusi yang dilakukan adalah meningkatkan kerjasama dan integrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gresik Telah Melakukan Kerjasama Dengan OPD Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik yaitu Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga (DISPAREKRAFBUDPORA), Dinas Perhubungan (DISHUB), Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL), Dinas Komunikasi Dan Informasi (DISKOMINFO), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta masih banyak OPD lainnya. Kerjasama merupakan pokok yang penting dalam penguatan lembaga, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Dengan adanya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) akan berpengaruh pada efektivitas program kegiatan dimana anggaran dapat terserap secara optimal.

Pemerintah daerah (Pemda), setiap tahunnya menyusun perencanaan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian untuk penyusunan berdasarkan program dan kegiatan dalam batas waktu yang dinyatakan dalam satuan uang dan barang.

Anggaran merupakan elemen kunci dalam pengendalian untuk menjamin keselarasan dan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan anggaran adalah kegiatan menyusun rencana pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Proses pelaksanaan suatu penganggaran menitik beratkan pada proses penentuan jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah. Proses penyelesaian anggaran harus mempertimbangkan beberapa faktor agar tercipta tujuan keefektifan dan tepat guna sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Selain itu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia. Menurut (Abdul, 2014), faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah persaingan sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia ini berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Namun, sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya dengan pengembangan teknologi yang diterapkan tanpa dukungan sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia akan bekerja dengan segala kemampuan, keterampilan dan pengetahuan untuk mencapai tujuan organisasi. Jika pemerintah memiliki kompetensi personal yang baik, maka proses pengalokasian anggaran di satuan kerja perangkat daerah (RPU) akan dikuasai dengan baik. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 mengenai pengukuran dan evaluasi pelaksanaan anggaran terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. Tujuan dari penilaian kognitif kinerja adalah untuk menjalankan fungsi akreditasi serta akuntabilitas, yaitu untuk menetapkan dan memelihara standar profesional bagi pengguna anggaran.

Pentingnya efektivitas dalam pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pertanggungjawaban atau pelaporan anggaran akan berdampak pada akuntabilitas pemerintah yang berhubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan anggaran yang efektif ini juga yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Gresik. Efektifitas kinerja pemerintah menjadi tolok ukur dalam penyerapan anggaran untuk menggerakkan roda perekonomian. Tingkat penyerapan anggaran selalu menjadi topik penting yang sering dibicarakan pengamat ekonomi sebagai bukti kegagalan birokrasi. Kegagalan untuk memenuhi target alokasi anggaran dapat mengakibatkan hilangnya manfaat belanja karena tidak semua dana akan dicairkan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah (Rahayu, 2020). Untuk mengetahui pemerintah daerah telah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap program yang telah disusun dapat di amati pada tingkat penyerapan anggaran (Fajar & Arfan, 2017).

Faktor-faktor yang sering mempengaruhi Efektivitas kinerja secara umum dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, dalam penelitian ini akan berfokus kepada perencanaan anggaran serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Berbicara mengenai kinerja, memang sangat erat kaitannya kepada kualitas SDM serta efektivitas dengan proses perencanaan (Aldita & Muniruddin, 2018). Perencanaan oleh SDM ahli dilakukan guna memastikan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan langkah-langkah yang disiapkan. Jikalau tidak diterapkan demikian, maka perencanaan tidak matang akan berdampak pada jadwal kerja dan tepat guna kegiatan kemudian berujung pada kegagalan anggaran (Basri et al, 2022).

Banyak peneliti telah melakukan penelitian tentang dampak perencanaan anggaran terhadap tingkat perkembangan anggaran. Sebuah studi yang dilakukan (Puluala, 2021) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran mempengaruhi penggunaan anggaran karena semakin baik pengelolaan anggaran dalam perencanaan, maka semakin baik program atau operasi yang dilaksanakan selama tahun anggaran untuk mencapai anggaran tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ramdhani & Anisa, 2017) yang menemukan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan anggaran dan kualitas pegawai berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini berbeda dengan penelitian (Dewi et al., 2017) yang menemukan bahwa variabel keterampilan sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan anggaran. Kajian Halim (2018) menunjukkan bahwa faktor perencanaan anggaran berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan anggaran. Berdasarkan beberapa penelitian dengan hasil yang berbeda, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas perencanaan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah yang diukur dari penggunaan anggaran. Hasil penelitian disajikan dalam laporan abstrak berjudul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari apa yang sudah dipaparkan dan diuraikan pada latar belakang, maka berikut disusun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini:

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap efektifitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektifitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setelah ditetapkan rumusan masalah utama dalam penelitian kali ini, maka secara eksplisit tujuan penelitian ini ialah mencari tahu apa pengaruh dari perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap evektifitas kinerja khususnya organisasi perangkat daerah di wilayah Kabupaten Gresik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memajukan pengetahuan dan pemahaman tentang daerah organisasi di Kabupaten Gresik guna memahami pentingnya perencanaan anggaran dan kualitas SDM dalam kaitannya dengan evektifitas kinerja pemerintah daerah.

2. Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran. Sebagai informasi dan dokumen masukan untuk pengkajian dan penilaian kinerja anggaran.

### 3. Bagi Pembaca Dan Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat dan dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti selanjutnya salah satunya dibidang akuntansi sektor publik. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menjadi proposal bagi pengembangan ilmu yang diteliti. Selain itu, hasil penelitian ini juga dimaksudkan sebagai gambaran, bahan referensi, pembandingan dan sumber untuk penelitian selanjutnya.

